



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 847/DJU/HK 00.1/8/2021 Jakarta, 10 Agustus 2021
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Advokasi Tentang Penanganan Kasus
Berbasis Pemenuhan Hak Anak Bagi Aparat
Penegak Hukum dan Lembaga Pelayanan ABH

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia
2. Ketua Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia

di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Nomor B-401/D.PKA.4/PA.02.03/8/2021 tanggal 6 Agustus 2021 hal Advokasi Tentang Penanganan Kasus Berbasis Pemenuhan Hak Anak Bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Pelayanan ABH (terlampir), diminta kepada Saudara untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut di atas yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021
Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Zoom meeting (Meeting ID: 684 084 4245,
Passcode: pedulianak)

Selanjutnya, pada waktu kegiatan tersebut agar mengisi form daftar hadir melalui link <https://forms.gle/ep5YsGdABzguUBvJ9> sebagai bukti kehadiran Saudara.

Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.


**DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM,**

PRIM HARYADI



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842538, 3305563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Nomor : B-401/D.PKA.4/PA.02.03/8/2021
Lampiran : Dua berkas
Hal : Advokasi Tentang Penanganan Kasus Berbasis Pemenuhan Hak Anak Bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Pelayanan ABH

6 Agustus 2021

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)
di -
Tempat

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, dalam diri Anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan pemenuhan haknya terutama pada perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

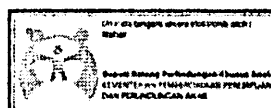
Dalam rangka menyamakan persepsi, pemahaman dan komitmen terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak akan menyelenggarakan kegiatan Advokasi Tentang Penanganan Kasus Berbasis Pemenuhan Hak Anak Bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Pelayanan ABH dengan tema Percepatan implementasi PP Kebiri dan Peningkatan implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait Penanganan Kasus Berbasis Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021
Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Zoom Meeting (Meeting ID: 684 084 4245, Passcode: pedulianak)

Sehubungan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat hadir tepat waktu dan menggunakan Zoom ID dengan format Nama_Instance (Contoh: Galang_DP3A Prov NTB). Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan jadwal tentatif kegiatan dimaksud. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Ghina (0812-9909-7956) dan Sdri. Afi (0812-2985-7171).

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak,



Nahar

Tembusan Yth:

- 1 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2 Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah diandatangani secara elektronik yang terverifikasi dan Berbasis Elektronik (BBE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

Lampiran

Surat nomor : B- 401/D.PKA.4/PA.02.03/8/2021

**DAFTAR LAMPIRAN UNDANGAN
ADVOKASI TENTANG PENANGANAN KASUS BERBASIS PEMENUHAN HAK ANAK BAGI APARAT PENEGAK
HUKUM DAN LEMBAGA PELAYANAN ABH**

- 1. Mahkamah Agung**
 - 1) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
 - 2) Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
 - 3) Kepala Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia
 - 4) Kepala Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia
- 2. Kejaksaan Agung**
 - 5) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
 - 6) Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia
 - 7) Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia
- 3. Kepolisian Negara RI**
 - 8) Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri
 - 9) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri
 - 10) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Seluruh Indonesia
- 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
 - 11) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
 - 12) Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga
 - 13) Ibu Ulfah Mawardi, Staf Khusus Menteri
 - 14) Sekretaris Deputi Perlindungan Khusus Anak
 - 15) Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
 - 16) Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus
 - 17) Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
 - 18) Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
- 5. Kementerian Hukum dan HAM**
 - 19) Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
 - 20) Sub Direktorat Pendidikan dan Pengentasan anak
 - 21) Sub Direktorat Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan
 - 22) Kepala LPKA Seluruh Indonesia
 - 23) Kepala Balai Pemasyarakatan Seluruh Indonesia
- 6. Kementerian Sosial**
 - 24) Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
 - 25) Direktur Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
 - 26) Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum
 - 27) Pekerja Sosial Profesional Seluruh Indonesia
 - 28) Tenaga Kesejahteraan Sosial Seluruh Indonesia
- 7. Dinas yang Membidangi Perlindungan Anak**
 - 29) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Seluruh Indonesia
 - 30) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab/Kota Seluruh Indonesia
 - 31) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
 - 32) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
 - 33) Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA)
- 8. PERADI**
 - 34) Perhimpunan Advokat Indonesia

Lampiran

Surat nomor : B- 401/D.PKA.4/PA.02.03/8/2021

JADWAL TENTATIVE
ADVOKASI TENTANG PENANGANAN KASUS BERBASIS PEMENUHAN HAK ANAK
BAGI APARAT PENEGAK HUKUM DAN LEMBAGA PELAYANAN ABH

Waktu	Kegiatan	Narasumber/ Penanggungjawab
08.30 – 09.00	Registrasi peserta	Panitia
09.00 – 09.05	Pembukaan	MC
09.05 – 09.10	Mendengarkan lagu Indonesia Raya	Panitia
09.10 – 09.15	Pembacaan Doa	Panitia
09.15 – 09.25	Sambutan dan arahan, sekaligus membuka acara secara resmi	Deputi PKA
09.25 – 09.30	Foto Bersama Peserta	Panitia
09.30 – 12.00	Talkshow "Percepatan implementasi PP Kebiri dan Peningkatan implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait Penanganan Kasus Berbasis Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum di Tingkat Penyidikan, Penuntutan, Pengadilan, serta bagi Advokat dan Lembaga pelayanan Anak Berhadapan dengan Hukum"	Narasumber: Unit PPA Bareskrim POLRI Kejaksaan Agung RI Mahkamah Agung RI Koordinator Nasional ECPAT Indonesia Moderator: Mirna Fitri Nur Cahyani Dewi JFT PK Pertama Bapas Kelas II Madiun, founder komunitas Mahar Bumi
12.00 - Selesai	Penutupan	Asdep PKAK